

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DIKAWASAN PUSAT KOTA PALU

Muhammad Ramlan Salam

Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Tadulako

Abstrak

Keberhasilan pembangunan di era reformasi sekarang ini, khususnya dalam Kegiatan peningkatan kualitas permukiman di kawasan pusat kota, sangat ditentukan oleh adanya partisipasi aktif dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini tentunya dipengaruhi oleh motivasi dan masyarakat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui signifikansi pengaruh faktor-faktor motivasi, pengetahuan, dan faktor kepemimpinan tokoh masyarakat bersama aparat pemerintah dalam peningkatan kualitas permukiman di KPKP; (2) Untuk mendapatkan model manajemen pembangunan permukiman yang partisipatif.

Sampel penelitian sebanyak 370 orang yang ditarik secara proporsional cluster random sampling sederhana dan 8704 kepala keluarga di Kelurahan Lere, Kamonji, Besusu Barat, dan Kelurahan Lolu Utara (Kawasan Pusat Kota Palu). Data dikumpulkan dengan memakal teknik observasi, angket, interviu dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik statistik deskriptif dan inferensial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di KPKP cukup baik. Cukup baiknya tingkat partisipasi ml disebabkan oleh tujuh faktor, yaitu: tingkat keamanan sebesar 69 persen, intensitas berinteraksi sosial sebesar 79 persen, kebutuhan prasarana dan sarana permukiman sebesar 52 persen, penghargaan sebesar 94 persen. kesempatan menerapkan kemampuan 65 persen, tingkat pengetahuan 98 persen, dan faktor kepemimpinan sebesar 27 persen.

Kata Kunci: *Partisipasi, KPKP, Permukiman*

PENDAHULUAN

Konsep partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (sebagai salah satu dari berbagai upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman) telah muncul sejak akhir tahun 1950an di Amerika Serikat, awal tahun 1960-an di Britania Raya (Oothuizen. 1984:204), dan di Jepang di akhir tahun 1970-an (OECD, 1986:118). Di Indonesia, walaupun berbagai pihak telah berkeinginan menerapkannya sejak tahun 1980-an, namun secara formal baru terwujud melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Para ahli mulai meninggalkan istilah-istilah: “pihak yang terlibat dalam pembangunan”, “pelaku pembangunan”, dan sebagainya. Mereka lebih memilih menggunakan istilah “stakeholders” yang tidak berkonotasi dikotomis tetapi secara

menyatu bersama-sama menentukan kebijaksanaan, melaksanakan dan menanggung implikasi hasil pembangunan, baik ataupun buruk. Jika ini menjadi konsensus, tentunya akan mengandung konsekuensi logis bahwa dalam pembangunan di bidang apapun, seluruh pihak berhak dan wajib berpartisipasi, tidak hanya dalam pelaksanaannya, tetapi juga mulai dan inisiatif awal, penelitian dan perencanaan, pengambilan keputusan kebijaksanaan, pengendalian, termasuk menanggung akibat dari suatu pelaksanaan kebijaksanaan bersama tersebut.

Paradigma partisipasi seluruh stakeholders tersebut bersama-sama paradigma lainnya, yaitu “pemberdayaan masyarakat” menjadi semacam pemicu bagi timbulnya gairah memformalkan partisipasi di segala aspek pembangunan tersebut dalam proses teknis

dan prosedur administratif pembangunan yang konstitusional legal, termasuk dalam hal penataan ruang ataupun upaya-upaya peningkatan kualitas permukiman lainnya.

Pengalaman serta evaluasi terhadap tindak penanganan permukiman menunjukan, bahwa masih di perlukan pemikiran serta upaya-upaya penunjang program yang di lancarkan selama ini, kiranya perlu dipahami secara seksama proses masyarakat dalam peningkatan kualitas permukimannya.

Walaupun program-program di atas di pandang sebagai suatu alternatif upaya peningkatan kualitas permukiman, tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang menemui kegagalan, sementara program-program tersebut melibatkan pihak lain yakni swasta dan masyarakat.

Agar masyarakat dapat berperan aktif dalam program peningkatan kualitas permukiman, maka seharusnya mereka terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang apa yang akan dilaksanakan . Rogers (1974) dalam Notoatmodjo (1993) mengisyaratkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di tentukan oleh tingkat pengetahuannya terhadap stimulus yang di peroleh dari proses runtut, sebagai berikut: (1) Awaraness atau kesadaran: mengetahui terlebih dahulu obyek : (2) Interest: mulai tertarik: (3) Evaluation: menimbang-nimbang untung ruginya: Trial: mulai berpartisipasi,dan (5) Adoption: berpartisipasi aktif.

Agar masyarakat dapat berproses sebagaimana di atas, maka dalam peningkatan kualitas permukiman seharusnya mereka dilibatkan sejak awal. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat mengadaptasikan dirinya mulai dari mengetahui sampai ke berpartisipasi aktif dalam program tersebut.

Kenyataan yang ada di KPKP menunjukan bahwa peningkatan kualitas permukiman

disusun dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Selain swasta yang berorientasi “profil”, masyarakat umumnya tidak di libatkan secara aktif. Akibatnya, masyarakat tersebut tidak termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka titik berat penelitian ini adalah pada rumusan masalah, yaitu: Bagaimana signifikansi faktor-faktor motivasi, pengetahuan ,dan faktor kepemimpinan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman di KPKP?

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang Relevan

Berbagai pengertian yang ditujukan bagi partisipasi masyarakat dalam penataan ruang ataupun program peningkatan kualitas permukiman,bermunculan melalui debat ilmiah sengit para ahli sejak awal konsepsi ini dikenalkan di tahun 1950-an. Secara ringkas, debat ilmiah dimulai pada saat Arnstein (1969) mengemukakan penggolongan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ke dalam delapan anak tangga atau tingkatan berdasarkan tingkat “Kekuasaan” yang di berikan kepada masyarakat. Arnstein (1969:217) menyatakan bahwa dalam pekerjaan perencanaan yang di selenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah, pada dasarnya dapat diidentifikasi adanya delapan tingkatan, dari yang tertinggi ke lebih rendah, yaitu: (1) kontrol masyarakat (citizen control); (2) pelimpahan kekuasaan (delegated power); (3) kemitraan (partnership); (4) penentraman (placation); (5) konsultasi (consultation); (6) informasi (information); (7) therapi (theraphy); dan (8) manipulasi (manipulation).

Klasifikasi terendah (8) dan (7) dikatakannya bukan sebagai partisipasi, masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek suatu kegiatan. Tiga klasifikasi berikutnya (6), (5), dan (4) termasuk ke dalam derajat "penghargaan" atau "mengalah", yaitu saat masyarakat sudah di ajak bicara tentang keinginannya dan gagasannya, tetapi keputusan apa yang akan diambil sepenuhnya di tangan pemerintah. Tiga klasifikasi puncak (3), (2), dan (1) adalah apa yang sebenarnya ada dalam gagasan Arnstein tentang partisipasi masyarakat itu sendiri, yaitu pada derajat kekuasaan masyarakat, di mana sudah terjadi pembagian hak, tanggung jawab, dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi meneruskan persepsi Arnstein tersebut, partisipasi masyarakat seharusnya di rumuskan sebagai ikut mengambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar peneliti berpendapat bahwa bukan saja "partisipasi" adalah sesuatu yang baik dan perlu, tetapi juga semakin tinggi tingkat kekuasaan pengambilan keputusan yang dimiliki oleh masyarakat adalah semakin baik. Ada dua asumsi dasar dari pendapat ini, yaitu: pertama, seseorang lebih mengenal dirinya dan dunianya sendiri daripada orang lain sehingga lebih tahu apa yang baik bagi dirinya; dan kedua, seseorang berhak ikut serta menentukan segala sesuatu yang akan mempengaruhi hidupnya di masyarakat.

Sulaiman dan Toana (1992) dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengemukakan bahwa indikator partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, dapat dilihat dari hal-hal berikut:

(1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan; seseorang terlibat dalam perumusan suatu keputusan, memberi usul atau saran, kritik dan hadir dalam

setiap pertemuan dan diskusi berhubungan dengan program

- (2) Partisipasi dalam pelaksanaan; yakni seseorang memberi sumbangan dalam bentuk tenaga, bahan, uang, dan terlibat secara aktif memberi semangat sehingga terjadi intensitas tindakan-tindakan konstruktif.
- (3) Partisipasi dalam memperoleh keuntungan; yakni seseorang turut menikmati sarana dan prasarana yang ada secara menyeluruh.
- (4) Partisipasi dalam kegiatan evaluasi; yakni keterlibatan seseorang untuk ikut menilai secara langsung atau tidak langsung mengenai program dan pelaksanaan pembangunan.

Pengertian Partisipasi

Definisi yang dikemukakan oleh berbagai ilmuwan atau lembaga belum terdapat satu kesepakatan, sedangkan teori-teori yang dipergunakan pada umumnya langsung menyangkut kepada penerapannya atau aplikasinya.

Namun demikian, tulisan ini akan mengemukakan beberapa definisi dan pendapat tentang partisipasi masyarakat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu.

Gordon Allport dalam bukunya yang berjudul *The Psychology of Participation* (1945) dalam santoso (1988:12), menyatakan:

"The person who participates is ego-involved instead of merely task-involved"

"partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas(kejiwaan) lebih dari pada hanya jasmaniah/fisik saja".

Keith Davis pada bukunya *Human Relations at work* (1962) dalam santoso (1988:13), menyatakan:

"Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them"

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Didalamnya terdapat tiga unsur (gagasan) yang penting artinya bagi para manager atau pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan ketiga gagasan tersebut, yaitu:

- (1) Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- (2) Kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan segala nilainya.
- (3) Tanggung jawab merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada rasa “sense of belongingness”

Secara etimologis, menurut Subekti (1984) partisipasi berarti ikut ambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi. Sedangkan Marjono (1985) mengartikan partisipasi masyarakat pada hakekatnya adalah keterlibatan/keikutsertaan secara aktif dalam proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi/kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan dan kemauan yang memadai, turut serta memutuskan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, dapatlah disimpulkan bahwa pengertian partisipasi yaitu sebagai proses

keterlibatan dan keikutsertaan seseorang atau kelompok orang secara sadar dalam suatu proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui tahapan: perencanaan, pemanfaatan hasil kerjasama, serta pemeliharaan dan perbaikan kualitas permukiman.

Berdasar pada uraian-uraian di atas, maka definisi partisipasi dalam studi ini adalah: Keterlibatan secara aktif dari masyarakat pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diorganisir dalam bentuk sumbangan buah pikiran (ide), tenaga, materi, dan waktu.

Partisipasi dan Kebutuhan Hidup Masyarakat

Muhaimin (1987) mengemukakan bahwa teori partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam dua matra, yaitu : matra sosial dan matra modernitas. Pada matra ini terlihat nuansa partisipasi secara horizontal dan vertikal.

Untuk matra sosial dikemukakan oleh muhaimin (1987:132), sebagai berikut:

- (1) Pola umum; Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintah dan non pemerintah nyaris seimbang. Artinya ,bila terjadi kerjasama antara keduanya , yang terwujud adalah kegiatan semi-pemerintah, maka partisipasi dalam kegiatan tersebut cenderung meningkat
- (2) Pola dualistik; Partisipasi masyarakat dalam kegiatan non-pemerintah lebih tinggi daripada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang disponsori pemerintah. Dengan perkataan lain, kegiatan yang dimotori non-pemerintahan lebih mampu menarik dukungan masyarakat daripada yang disponsori pemerintah. Jika hal ini benar, maka bisa jadi disebabkan oleh kegiatan pemerintah tersebut tidak dikelola dengan baik.

Ditinjau dari aspek pendekatannya, Ramos dan Ramon (1980) menyatakan bahwa top-down approach kurang tepat digunakan. Sebaliknya, bottom-up approach lebih sesuai karena lebih mengutamakan manajemen partisipasi. Kesesuaian pendekatan ini didasarkan atas kondisi aktual, dimana paket pelayanan perkotaan di Indonesia kurang menjanjikan kelompok sosial ekonomi tertentu (peripheral), sehingga kebutuhan dan masalah sebenarnya dalam masyarakat kadangkala berbeda dengan yang ada dalam program pemerintah. Keadaan ini menyebabkan sebagian masyarakat berpaling pada organisasi sosial kemasyarakatan yang dianggap berhasil mengidentifikasi kebutuhannya.

Lang (1994) dalam Trisutomo (1997:4) mengemukakan bahwa sejumlah model kebutuhan hidup manusia telah diuji oleh berbagai perancang bangunan (misalnya Alexander, 1969; Peterson, 1969; Mikellides, 1980). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembangunan lingkungan buatan, termasuk peningkatan kualitas permukiman, haruslah mempertimbangkan perilaku manusianya.

Lang selanjutnya menyebutkan minimal ada lima model psikologi yang menguraikan tentang kebutuhan dasar hidup manusia yaitu yang dikemukakan oleh: Leighton (1959), Cantril (1965), Steele (1973), dan Maslow (1978).

Meskipun tiap model memiliki penekanan yang berbeda bahkan bila diperbandingkan sesama model saling tumpah-tindih, namun secara keseluruhan model tersebut berusaha mengemukakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupannya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Mengacu kepada teori dari Maslow, maka dalam konteks peningkatan kualitas permukiman di kawasan pusat kota Palu (KPKP), dapat dikemukakan bahwa orang

akan termotivasi untuk berpartisipasi apabila kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi pada permukiman tersebut, yaitu:

1. Rasa Aman

Permukiman bukan hanya sebagai wadah secara fisik saja, tetapi harus berfungsi sebagai kediaman atau tempat berlangsungnya kehidupan manusia.

Setelah secara fisik permukiman mampu memenuhi fungsi sebagai tempat teduh dari gangguan alam dan cuaca, maka giliran berikutnya harus memenuhi fungsi sebagai kediaman atau permukiman untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup serta mampu mengekspresikan kepribadian penghuninya.

Depres (1991) dalam Trisutomo (1997:4) mengemukakan bahwa suatu permukiman memiliki makna yang luas bagi pemakainya, di antaranya sebagai keamanan dan pengendalian.

2. Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan perwujudan dari kebutuhan sosial yang bermotif kuat setelah kebutuhan perlindungan dan keamanan sesuai teori Maslow.

Permukiman harus mampu mewujudkan kebutuhan warganya untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan sosial yakni: disenangi, dianggap sebagai pribadi yang setia kawan, dan dapat bekerjasama dalam kelompok masyarakatnya. Sehubungan dengan itu, Depres (1991) menyatakan bahwa fungsi lain dari permukiman adalah sebagai wadah kegiatan dan kediaman serta tempat hubungan keluarga dan sahabat.

3. Prasarana dan Sarana Permukiman

Sebagai wadah yang dapat mewujudkan kebutuhan mempertahankan hidup sebagaimana teori Maslow. Permukiman seharusnya memiliki prasarana dan sarana yang mampu memberikan perlindungan bagi masyarakatnya sehingga kebutuhan primernya dapat terpenuhi. Selain itu, prasarana dan sarana permukiman juga dapat

mewujudkan rasa aman dan kebutuhan sosial sebagaimana telah dikemukakan

4. Penghargaan

Penghargaan yang dimaksudkan adalah imbalan yang diterima oleh warga masyarakat atas prestasinya atau keikutsertaannya didalam peningkatan kualitas permukiman. Hal ini penting, karena selain akan memotivasi yang bersangkutan, juga dapat mempengaruhi warga yang lain untuk ikut berpartisipasi. Dengan demikian merupakan faktor ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

5. Kesempatan Meningkatkan Kemampuan atau Potensi Diri

Permukiman harus mampu berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang berupa self actualization (Maslow.1978).

Dalam konteks peningkatan kualitas permukiman di KPKP, agar masyarakat dapat termotivasi untuk berpartisipasi didalamnya, maka kegiatan tersebut perlu mengupayakan untuk melibatkan warga masyarakatnya yang mempunyai kemampuan dan keahlian.

6. Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (1993), pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan “domain” yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over behavior). Dari penelitian terbukti bahwa perilaku, termasuk berpartisipasi, didasari oleh pengetahuan. Rogers (1974) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni : (a) awariness (kesadaran), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu stimulus (obyek); (b) interest, dimana orang mulai tertarik pada stimulus; (c) evaluation, menimbang-nimbang baik tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya;

(d) triel, dimana orang telah mencoba perilaku baru; dan (e) adoption, dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

7. Kepemimpinan Tokoh Masyarakat dan Aparat Pemerintah

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tumbuhnya partisipasi masyarakat, karena pimpinanlah yang menstimulasi dan menggerakkan masyarakat secara tepat dengan jalan menerapkan kemampuannya berkomunikasi secara baik dan efektif. Selain itu, kepemimpinan tokoh masyarakat bersama aparat pemerintah dianggap efektif apabila dapat menunjukkan kesepakatan bersama dalam menanggapi kebutuhan aktual masyarakat.

Djasmin (1986:11) mengartikan kepemimpinan sebagai suatu kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk berfikir dan berperilaku dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi atau kelompok di dalam situasi tertentu. Selanjutnya Djasmin mengemukakan macam-macam gaya kepemimpinan, diantaranya: (a) otokratik/otoriter; memaksakan, mengatur/mendikte anggota, anggota sebagai benda yang harus diladeni, sebagai diktator/penguasa mutlak; (b) demokratik; anggota dianggap manusia dan dihormati, saran-saran anggota diperhatikan, sifat kolegial; dan (c) paternalistik/kebakapan; sifat sebagai bapak, mengatur, mengambil prakarsa, merencanakan/melaksanakan sesuai polanya, tidak diktator, dan membantu anggota dalam mengambil keputusan/merumuskan kebijaksanaan.

Manajemen Permukiman

Manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan organisasi, perusahaan, karyawan, dan

masyarakat. Daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen dapat ditingkatkan dengan manajemen itu sendiri.

Unsur-unsur manajemen tersebut terdiri atas: man, money, methode, machines, materials, dan market; di singkat 6 M (Hasibuan, 1994:1).

Manajemen berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur. Timbul pertanyaan tentang : apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur dan bagaimana mengaturnya ?

Hasibuan (1994:1) menyebutkan bahwa didalam manajemen:

- (1) Semua unsur manajemen yang diatur.
- (2) Tujuannya adalah agar 6M lebih banyak berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan.
- (3) Harus diatur supaya 6M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.
- (4) Pimpinan dengan kepemimpinannya, yaitu pimpinan puncak, manager madya, dan supervisi yang mengatur unsur-unsur tersebut.
- (5) Cara mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut.

Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para penulis tidak sama, tergantung pada pendekatan dan sudut pandangnya masing-masing.

Berdasar pada karakteristik permukiman dan upaya-upaya manajemen yang dilakukan terhadapnya, maka unsur-unsur manajemen permukiman sebagai salah satu bagian dari bidang manajemen non-perusahaan, adalah: man, money, methode, machines, dan materials. Karena subyek dan sekaligus obyek dari permukiman tersebut adalah masyarakat, maka partisipasi masyarakat dalam penerapan manajemen ini sangat dominan. Artinya, manajemen yang

diterapkan adalah manajemen yang partisipatif.

Dengan demikian, fungsi manajemen yang relatif sesuai dengan manajemen pembangunan permukiman yang partisipatif adalah kombinasi pendapat Terry (1978) dengan Siagian (1988), yaitu: (1) planning, (2) organizing, (3) actuating, (4) controlling, dan (5) evaluating.

Berkaitan dengan penerapan manajemen permukiman yang partisipatif, dimana faktor terpenting untuk mencapai tujuan manajemen tersebut adalah partisipasi masyarakat, Rochadi (1993:5) menyatakan perlunya memanfaatkan dan meningkatkan peran kelembagaan yang sudah ada dalam masyarakat sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan itu, Yeung dan McGee (1980) memberikan contoh konkrit bahwa di Philipina, organisasi masyarakat “Barangay” yang berjenjang sampai ke unit terkecil. Unit terkecil yaitu unit administrasi yang mengatur pelayanan umum. Pemerintah mendukung dan mengambil langkah untuk memperkuat posisi organisasi masyarakat tersebut.

Untuk mendaya gunakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Rochadi (1993:16) menyatakan bahwa diperlukan beberapa persyaratan, antara lain organisasi masyarakat harus tanggap terhadap situasi aktual dan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan perannya sebagai penunjang, organisasi masyarakat mendaya-gunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam pembangunan, baik sebagai pencetus gagasan, sebagai motivator, maupun sebagai penggerak dan pelaksana berbagai kegiatan masyarakat.

Lebih lanjut, Rochadi menyatakan bahwa untuk mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dukungan informasi yang tepat. Ketepatan informasi berkaitan dengan waktu, kelengkapan dan

mudahnya dipahami. Dalam hubungan ini perlu di perhatikan aspek-aspek khusus yang ada pada kelompok sasaran .

Berpangkal tolak dari pembahasan diatas, maka dapatlah dikemukakan empat faktor yang perlu dicermati untuk di pertimbangkan dalam penyusunan model manajemen permukiman yang partisipatif, yaitu:

- (1) **Kebutuhan masyarakat;** dalam aplikasinya, partisipasi masyarakat hanya akan terwujud apabila mendapat dukungan dari masyarakat. Berkaitan dengan gagasan tersebut, hendaknya pemerintah melontarkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga dapat memberi manfaat, bukan saja bagi masyarakat melainkan pula kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, dan sebagainya. Dengan sesuainya program dengan kebutuhannya, masyarakat akan dapat tertarik untuk berpartisipasi.
- (2) **Organisasi masyarakat;** merupakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan pembangunan. Organisasi yang sudah ada dan tumbuh dalam masyarakat perlu difungsikan dengan baik agar masyarakat mengenal dan memberikan dukungan untuk menjamin kelancaran kegiatannya. Oleh karena itu, institusi yang ada dalam masyarakat hendaknya dilengkapi perangkat yang memiliki ketajaman dan kepedulian dalam merumuskan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan program pembangunan.
- (3) **Sosialisasi program;** yang dimaksud disini adalah pemberian informasi kepada masyarakat tentang program ataupun upaya-upaya peningkatan kualitas permukimannya. Kegiatan ini dapat membantu kepada hal-hal berikut: (1) memberikan pengertian kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman;

(2) memberikan motivasi dan persuasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang berkualitas; dan (3) memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai wujud dari program peningkatan kualitas permukiman di KPKP.

- (4) **Kepemimpinan;** faktor lain yang tidak kalah pentingnya ialah kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan tokoh masyarakat bersama aparat pemerintah. Hal ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tumbuhnya partisipasi masyarakat, karena pimpinanlah yang menstimulasi dan menggerakkan masyarakat secara tepat dengan jalan menerapkan kemampuannya berkomunikasi dengan baik dan efektif. Selain itu, kepemimpinan tokoh masyarakat bersama aparat pemerintah dianggap efektif apabila dapat menunjukkan kesepakatan bersama dalam menanggapi kebutuhan aktual masyarakat.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah warga masyarakat yang bermukim dan berada pada lokasi penelitian, yaitu di kelurahan Lere, Kamonji, lolu Utara, dan di Kelurahan Besusu Barat. Pada keempat kelurahan tersebut terdapat populasi sebanyak 8704 kepala keluarga (BPS Kota Palu, 2000) sebagai populasi target (Singarimbun, 1982). Penentuan populasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam setiap rumah di keempat kelurahan tersebut ditetapkan satu orang sebagai subyek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kualitas permukiman di KPKP diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kota, sehingga tidak terjadi

tumpang tindih di lapangan. Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program tersebut senantiasa diharapkan untuk mengefektifkan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Kota Palu agar memberikan hasil yang optimal, berdaya-guna dan berhasil-guna.

Kebijakan pembangunan kota yang ditetapkan selama ini merupakan acuan dalam penyusunan program peningkatan kualitas permukiman. Kebijakan tersebut termuat dalam Program Pembangunan Kota Palu tahun 2000 – 2004.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, peningkatan kualitas permukiman berdasarkan fungsi tata ruang kota dan wilayah dianggap penting dilaksanakan secara optimal dengan tetap memadukan isi kebijakan tata ruang dan wilayah Kota Palu dengan rencana Struktur tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan perkataan lain, pelaksanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sehingga tujuan pembangunan kota palu dapat dicapai dan dikembangkan sesuai potensi yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut tidak dapat mengabaikan ketentuan yang menghendaki keterkaitan perencanaan pembangunan kota dengan kegiatan konservasi dan preservasi suatu kawasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan kualitas permukiman di KPKP diarahkan pada terwujudnya prinsip keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar kawasan, serta keserasian antar sektor dalam memanfaatkan ruang (area) bagi kegiatan pembangunan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Di Kawasan Pusat Kota Palu

Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah wujud sumbangan berupa: (1)

ide/pikiran, (2) tenaga, (3) dana/uang, dan (4) material/bahan, yang diberikan oleh masyarakat di dalam manajemen peningkatan kualitas permukiman di KPKP.

Asumsi dasarnya adalah, semakin banyak wujud sumbangan yang diberikan oleh masyarakat maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat tersebut. Hal ini logis, karena dengan banyaknya wujud sumbangan masyarakat tersebut, maka pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman dapat dilakukan dengan baik, dan relatif menggunakan waktu yang tidak lama.

Pada kenyataannya, di Kelurahan Lere, Kamonji, Besusu Barat dan Kelurahan Lolu Utara, wujud sumbangan masyarakat dalam manajemen peningkatan kualitas permukiman, dinilai masih rendah karena kebanyakan hanya memberikan satu wujud sumbangan pada seluruh fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor penting yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman di KPKP. Faktor penting yang dimaksud, sebagaimana dibahas pada bab tinjauan pustaka, dapat disistematisir, sebagai berikut:

1. Tingkat Keamanan

Tingkat keamanan lingkungan permukiman merupakan salah satu faktor yang dianggap berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal itu berdasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat yang bermukim pada kawasan yang bebas dari gangguan keamanan dan ancaman lingkungan cenderung bersedia terlibat dalam upaya peningkatan kualitas permukimannya. Jadi, manakala masyarakat tersebut diperhadapkan pada persoalan tanggung jawab dalam

mensukseskan program pembangunan, maka akan ditanggapi secara positif. Dengan demikian, tanggapan masyarakat terhadap upaya peningkatan kualitas permukimannya diaktualisasikan dalam berbagai bentuk dan jenis sesuai kecenderungan perbedaan gangguan lingkungan yang dirasakan ataupun dialami.

2. Intensitas Berinteraksi Sosial

Dalam penelitian ini dikumpulkan data tentang intensitas berinteraksi sosial yang dilakukan oleh warga dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan di lingkungannya. Hal ini penting di bahas karena asumsinya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dikelola oleh organisasi non-pemerintah biasanya lebih tinggi bobotnya dibandingkan jika di sponsori oleh pemerintah. Dengan perkataan lain, kegiatan yang diwadahi oleh organisasi yang tumbuh dari bawah (masyarakat) akan lebih mampu menarik partisipasi aktif masyarakat.

Organisasi sosial kemasyarakatan seperti LKMD/LMD, Karang Taruna dan Organisasi Pemuda, LSM, Arisan, dan lain-lain, berfungsi untuk mendorong masyarakat agar senantiasa berpartisipasi sesuai unit fungsionalnya, sehingga organisasi tersebut dapat berfungsi sebagai mitra pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi dan peranannya, organisasi sosial kemasyarakatan itu mengikut sertakan sebanyak mungkin anggotanya dalam pembangunan, baik sebagai pencetus gagasan (ide), motivator, maupun sebagai penggerak dan pelaksana.

Data yang disajikan diatas menceminkan bahwa cukup banyak warga masyarakat yang aktif di dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Atas dasar itu,

dapat dipahami bahwa organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di KPKP belum maksimal pemanfaatannya sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas permukiman.

3. Kebutuhan Prasarana dan Sarana Permukiman

Ketersediaan prasarana dan sarana permukiman yang dibutuhkan oleh masyarakat berpengaruh terhadap keinginannya untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas permukimannya. Hal ini penting karena keinginan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sangat diperlukan, artinya partisipasi masyarakat tumbuh dengan sendirinya jika prasarana dan sarana permukimannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Peningkatan kualitas permukiman berdasar pada kebutuhan dan keinginan warga masyarakat terlihat dari ada atau tidaknya prasarana dan sarana permukiman yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kegunaan prasarana dan sarana tersebut bukan saja dirasakan oleh masyarakat setempat, melainkan pula bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, kebutuhan ini mencerminkan pula jenis prasarana sarana yang perlu diprioritaskan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

4. Penghargaan

Pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi merupakan salah satu faktor yang mendorong motivasi. Baik bagi yang memberi penghargaan tersebut maupun bagi orang lain. Hal ini logis karena dengan penghargaan itu orang akan merasa memperoleh imbalan dari apa yang telah dilakukannya, dan bagi orang lain akan terdorong untuk berbuat yang sama.

Kaitannya dengan peningkatan kualitas permukiman, pemberian penghargaan kepada orang atau mereka yang dinilai tingkat partisipasinya sangat aktif, tentunya akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, pada penelitian ini disajikan data tentang perlunya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksudkan diatas.

5. Kesempatan Menerapkan Kemampuan

Pada tinjauan pustaka telah diasumsikan bahwa masyarakat dapat termotivasi untuk berprestasi dalam kegiatan pembangunan, bilamana masyarakat tersebut memiliki peluang atau kesempatan untuk menerapkan kemampuan atau keahliannya dalam kegiatan tersebut. Hal ini logis, karena dengan demikian masyarakat itu akan dapat memperoleh manfaat dari kegiatan yang diikutinya. Selain itu, masyarakat yang memanfaatkan peluang ini akan merasa dapat mengembangkan potensi dirinya dengan adanya kegiatan ini. Dengan demikian, masyarakat tersebut akan selalu berupaya untuk senantiasa dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan sejenis.

6. Tingkat pengetahuan

Tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dianggap berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal itu berdasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat yang berada pada tingkat "adaption" cenderung lebih aktif dan skeptis dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi. Jadi, manakala masyarakat tersebut diperhadapkan pada persoalan tanggung jawab dalam mensukseskan program pembangunan, maka akan ditanggapi secara bijaksana, artinya masyarakat

tersebut akan mudah untuk turut serta dalam program.

Hal ini logis, karena masyarakat semacam ini sudah mengetahui dan memahami arti, fungsi dan tujuan dari program. Dengan demikian, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program peningkatan kualitas permukiman diaktualisasikan dalam berbagai bentuk dan jenis sesuai kecenderungan perbedaan tingkat pengetahuannya.

7. Kepemimpinan Tokoh Masyarakat dan Aparat Pemerintah

Kepemimpinan bersama aparat pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi keinginan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas permukiman. Secara praktis, diasumsikan bahwa pengambilan keputusan yang hanya dilakukan oleh pemimpin akan berbeda konsekuensi logisnya dengan model pengambilan keputusan yang melibatkan warga masyarakat. Tentu saja model pengambilan keputusan yang kedua dapat diterima dan dilaksanakan dengan semangat partisipatif oleh masyarakat karena didalamnya terdapat refleksi keinginannya.

Terkait dengan asumsi di atas, peran pemimpin dengan gaya kepemimpinannya, baik pemimpin formal maupun non-formal, sangat menentukan keberhasilan setiap kegiatan. Khusus mengenai keberhasilan program peningkatan kualitas permukiman ini terletak pada ada tidaknya pemimpin yang dapat bertindak sebagai motivator, memiliki sikap terbuka dan bersedia menerima masukan dari masyarakat. Dengan perkataan lain, pemimpin tersebut lebih proaktif mencari masukan dan pemecahan masalah yang dihadapi,

sehingga tampak arti penting keberadaannya di tengah masyarakat.

Tipe kepemimpinan yang “delegatif” diasumsi mampu memperoleh tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Hal ini logis, karena dalam tipe kepemimpinan semacam ini, setiap masalah didiskusikan, dan pemimpin mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada masyarakat serta masyarakat diberi hak melaksanakan keputusan serta menyelesaikannya sesuai dengan keputusan masyarakat itu sendiri.

Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman

1. Hubungan Tingkat Keamanan dengan Partisipasi Masyarakat.

Aspek keamanan merupakan salah satu tuntutan yang diperlukan oleh setiap subyek (responden, informan) yang diteliti. Urgensi aspek ini diteliti berdasar pada asumsi bahwa dengan tingkat keamanan lingkungan yang tinggi, masyarakat cenderung memberikan banyak wujud sumbangan dalam peningkatan kualitas permukimannya. Dengan demikian, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat juga dapat dipahami dari tingkat keamanan lingkungan permukimannya.

2. Hubungan Intensitas Berinteraksi Sosial dengan Partisipasi Masyarakat

Peranan berbagai jenis organisasi sosial dan kemasyarakatan dalam menstimulasi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai asumsi bahwa organisasi yang dibentuk dan mengakar di dalam masyarakat merupakan wadah partisipasi yang efektif. Oleh karena itu, keanggotaan warga masyarakat dalam organisasi yang dibentuk, seperti: LKMD/LMD, Karang Taruna, LSM, Arisan,

dan sebagainya merupakan titik awal partisipasi aktif yang diharapkan oleh pemerintah.

Partisipasi warga masyarakat dalam organisasi yang diikuti didasarkan atas dua kriteria pengukuran, yaitu: (1) seberapa besar frekuensi kehadiran warga dalam rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi yang diikuti, dan (2) frekuensi keterlibatan warga memberikan ide atau saran-saran mengenai peningkatan kualitas permukiman pada setiap pertemuan yang dilakukan.

3. Hubungan Kebutuhan Prasarana dan Sarana Permukiman dengan Partisipasi Masyarakat

Kebutuhan prasarana dan sarana permukiman merupakan salah satu tuntutan yang diperlukan oleh setiap subyek (responden, informan) yang diteliti. Urgensi aspek ini diteliti berdasar pada asumsi bahwa dengan jumlah dan jenis prasarana dan sarana permukiman yang dibutuhkan banyak dan bervariasi, masyarakat cenderung kurang memberikan wujud sumbangan dalam peningkatan kualitas permukimannya. Dengan demikian, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat juga dapat dipahami dari kebutuhan prasarana dan sarana permukimannya.

4. Hubungan Penghargaan dengan Partisipasi Masyarakat

Asumsi yang mendasari analisis ini adalah pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat atas prestasinya, memberikan pengaruh terhadap kemauan masyarakat berpartisipasi. Dengan perkataan lain, yang diuji adalah korelasi antara perlu tidaknya pemberian penghargaan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam

peningkatan kualitas permukiman dengan tingkat partisipasinya.

5. Hubungan Kesempatan Menerapkan Kemampuan dengan Partisipasi Masyarakat

Asumsi yang mendasari analisis ini adalah pembangunan yang dilaksanakan seharusnya memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan diri sesuai potensi yang dimiliki. Dengan perkataan lain, pembangunan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menerapkan kemampuan dan keahliannya. Berdasar asumsi ini, maka yang diuji adalah korelasi antara kesempatan menerapkan kemampuan dengan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman.

6. Hubungan Kepemimpinan dengan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan pemimpin formal dan non-formal, yakni aparat pemerintah dan tokoh masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman merupakan bukti nyata adanya kebersamaan semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan. Upaya ini memang diperlukan, mengingat ada sebahagian masyarakat yang merasa lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan di lingkungannya karena ada tokoh yang diteladani. Dengan demikian, diasumsikan bahwa keterlibatan pemimpin (formal dan non-formal) dengan tipe kepemimpinan sangat besar peranannya dalam menstimulasi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program peningkatan kualitas permukiman.

Manajemen Permukiman

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan “fungsi” memilih dan menentukan apa yang ingin dicapai. Berdasarkan hal ini, dalam tahap

perencanaan program peningkatan kualitas permukiman, perlu pelibatan masyarakat melalui organisasi sosial yang ada. Dengan demikian dapat ditentukan program apa yang perlu diprioritaskan dalam rangka peningkatan kualitas permukiman karena program yang akan disusun perencanaannya bersala dari masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian ialah fungsi menyusun kerangka kerja, tugas, dan tata hubungan kerja, sehingga seluruh bagian dapat bekerjasama secara harmonis dan efisien. Berdasarkan fungsi ini dan dikaitkan dengan prinsip dasar manajemen pembangunan permukiman yang partisipatif, maka dalam organisasi perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya: (1) susunan berdasar satuan fungsional; (2) “span of controle” tidak terlalu besar; (3) garis komando dari atas ke bawah maupun sebaliknya sependek mungkin; (4) sumber-sumber (tenaga, peralatan dan lain-lain) dikuasai oleh satu satuan saja, dalam hal ini masyarakat setempat; (5) wewenang terhadap operasi dimiliki oleh tokoh masyarakat atau aparat pemerintah setempat; (6) wewenang dan pengawasan rutin berada pada LMD.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan fungsi untuk dapat merealisasikan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal ini, maka dalam tahap pelaksanaan unsur manusia (salah satu dari 5M) memegang peranan penting, karena manusialah yang merencanakan dan melaksanakan rencana tersebut.

Dengan demikian, yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan ini adalah: (1) ketrampilan

dan pengetahuan para pelaksana senantiasa ditingkatkan; (2) penempatan pelaksana yang sesuai (tepat), qualified (bermutu), suasana kerja yang menggairahkan, keadilan, peningkatan kecakapan atau ketrampilan serta status sosial ekonomi.

4. Pengendalian

Pengendalian atau pengawasan adalah fungsi untuk memaksakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, perintah, prosedur, pedoman, dan lain-lain, sehingga program dapat berlangsung efektif dan efisien. Pengendalian meliputi seluruh kegiatan dalam program dan perlu didukung dan dihayati oleh seluruh petugas atau pelaksana.

5. Penilaian

Penilaian ialah fungsi pengambilan keputusan atas apa yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, dan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang perlu ditempuh. Sehubungan dengan itu, maka dalam peningkatan kualitas permukiman di KPKP, penilaian ini perlu dilakukan oleh aparat pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di permukiman tersebut. Hal ini penting, karena keputusan yang akan diambil atau hasil penilaiannya akan dikembalikan kepada masyarakat.

Berdasar pada hasil penilaian, selanjutnya masyarakat bersama tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah menentukan kembali langkah-langkah yang perlu ditempuh. Dengan kata lain, disusun kembali perencanaan untuk lebih meningkatkan kualitas permukiman.

sebagai analisis untuk mendapatkan model yang sesuai untuk diterapkan dalam program peningkatan kualitas permukiman di KPKP.

Model dipilih dengan mengacu pada “Participation Works”, yang meliputi Teknik Partisipasi Masyarakat untuk abad 21 sebagaimana disarankan The British Council (lampiran 09).

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman, dan pembahasan tentang manajemen permukiman, maka kriteria untuk menentukan model manajemen, sebagai berikut:

- (1) Masyarakat merasa aman di lingkungan permukimannya.
- (2) Organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan penentu kebijakan sebagai wadah untuk berinteraksi sosial secara efektif.
- (3) Kebutuhan prasarana dan sarana permukiman yang diprioritaskan dalam program peningkatan kualitas permukiman sesuai dengan keinginan masyarakat
- (4) Masyarakat merasa dihargai atas partisipasinya dalam peningkatan kualitas permukimannya
- (5) Masyarakat dapat menerapkan kemampuan dan ketrampilannya dalam peningkatan kualitas permukimannya.
- (6) Tingkat pengetahuan masyarakat tentang program peningkatan kualitas permukiman semakin bertambah.
- (7) Persepsi masyarakat tentang pemimpinnya, mengayomi dan bertindak selaku mitra di dalam peningkatan kualitas permukiman.

Penentuan Model Manajemen Permukiman

Penentuan model manajemen permukiman di sini, juga dimaksudkan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil yang dicapai dalam program peningkatan kualitas permukiman yang melibatkan partisipasi masyarakat di kawasan pusat Kota Palu (KPKP), dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Tingkat keamanan mempunyai pengaruh yang signifikan (nilai korelasi cukup kuat) terhadap partisipasi masyarakat di KPKP.
- (2) Intensitas berinteraksi sosial yang dilakukan masyarakat melalui organisasi sosial-kemasyarakatan mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
- (3) Kebutuhan prasarana dan sarana permukiman sehubungan dengan peningkatan kualitas permukiman mempunyai pengaruh yang sedang terhadap partisipasi masyarakat.
- (4) Pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berprestasi dalam peningkatan kualitas permukiman berpengaruh kuat terhadap tingkat partisipasinya.
- (5) Kesempatan menerapkan kemampuan atau keahlian dan ketrampilan dalam program peningkatan kualitas permukiman mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
- (6) Tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang peningkatan kualitas permukiman merupakan aspek yang paling berpengaruh, dibandingkan dengan aspek lainnya dalam penelitian ini, yakni tingkat signifikan yang kuat terhadap partisipasi masyarakat.
- (7) Kepemimpinan tokoh masyarakat dan aparat pemerintah melalui tipe kepemimpinannya mempunyai pengaruh yang lemah terhadap partisipasi masyarakat.
- (8) Pada dasarnya, tidak ada model manajemen pembangunan permukiman

partisipatif yang baku atau berlaku umum, karena hal ini ditentukan oleh faktor-faktor motivasi masyarakatnya. Artinya, model manajemen dengan teknik “action planning” hanya berlaku dalam peningkatan kualitas permukiman di KPKP.

- (9) Model manajemen pembangunan permukiman yang partisipatif bertumpu pada masyarakat. Artinya, mulai dari tahap pra-rencana sampai dengan perumusan program berikutnya, masyarakat setempat bersama tokoh masyarakatlah yang paling berperan. Pemerintah hanya sebagai mediator -dan konsultan untuk mewujudkan inspirasi masyarakatnya (kepemimpinan delegatif)

Saran

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program peningkatan kualitas permukiman di KPKP agar tercapai sasaran yang diinginkan secara berdaya-guna dan berhasilguna, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

- (1) Perlu mengaktifkan pelaksanaan sistem keamanan lingkungan, pengendalian banjir dan sampah, karena masalah ini banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat.
- (2) Fungsi dan peran organisasi sosial-kemasyarakatan yang ada, seperti, LKMD/LMD, Karang Taruna, Kelompok keagamaan, dan lain-lain agar lebih ditingkatkan, baik sebagai pencetus gagasan dan motivator maupun sebagai pelaksana manajemen permukiman.
- (3) Pemerintah kota dan aparat terkait sebelum melontarkan program peningkatan kualitas permukiman, perlu mengadakan pertemuan langsung secara intensif dengan warga dan tokoh masyarakat, untuk meyakinkan bahwa program tersebut memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- (4) Peran pemimpin, baik formal maupun pemimpin non-formal perlu ditingkatkan, yakni pemimpin yang bertindak selaku motivator, memiliki sikap terbuka, dan lebih proaktif mencari dan mengatasi masalah yang akan menentukan keberhasilan program peningkatan kualitas permukiman di KPKP.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arikunto,S, 1993, Manajemen Penelitian. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
2. Arnstein,S.1969, A Ladder of Citizen Participation, The Jurnal of the American Institute of Planners.Vol.35.no 4.
3. Devis.K and Newstorm,J.W, 1989, Perilaku dalam organisasi. Erlangga, Jakarta.
4. Handrianto,D.1996, Peremajaan Permukiman dengan Pendekatan Pembangunan yang bertumpu pada Masyarakat sebagai alternatif penanganan Permukiman Kumuh, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, No 22 September 1996, ITB.Bandung.
5. Lewis,J. D dan Walker.P 2001, Mewujudkan Partisipasi, 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk abad 21,News Economics foundation, The British Council,Jakarta.
6. Muhaimin,Y, 1987, menatap Masalah Pembangunan di Indonesia, Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia, GrafitaKama Offset, Jakarta.
7. Oetomo.A, 1997, Konsepsi dan Implikasi Penerapan Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Indonesia, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 8 no 2 April 1997. ITB, Bandung
8. Oosthuizen.A.J.G, 1984, Public Participation in Planning and development of Urban Areas, dalam Cities Cummunities and Planning in 1980's. Gower Publishing Company Limited, Hampshire, England.
9. Pabeta,R.1992, Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan kebersihan Lingkungan di Permukiman Sekitar Sungai Tallo Kotamadya Ujung Pandang, Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
10. Ramos,E and Ramon,A.A, 1980, Community Participation Model, In Community Participation in Delivery Urban Services in Asia, World Bank
11. Sanderock,L 1978. Citizen Paticipation: The new Conservartism;chapter 7 dalam Troy P.N (ed) : Federal Power in Australia's Cities. Hale & Iremonger, Sydney.
12. Santoso,S.R.A,1988 Partisipasi, Komunikasi, Perusasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung
13. Siswono, Y.1991, Rumah untuk Rakyat, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 1. Kerjasama PAUIS-UI dengan PT Gramedia, Jakarta.